



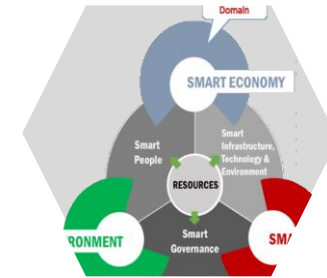
*Jateng*  
gayeng

# PENGENDALIAN OPERASIONAL

# KEGIATAN

# Bulan APRIL 2019

Semarang, 9 Mei 2019



# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH



@diskominfo\_jt



@kominfojateng



[diskominfo.jatengprov.go.id](http://diskominfo.jatengprov.go.id)

# APBD 2019 Diskominfo

## Rp. 74.982.053.000

**Belanja Tidak Langsung**  
19.982.053.000 (26,65%)

Gaji Pegawai  
Tunjangan Pegawai

**BTL**

Perencanaan & Evaluasi  
Kinerja Perangkat Daerah  
(2 Kegiatan)  
750.000.000 (1,36%).

Manajemen Adm Yan Umum,  
Kepegawaian & Keuangan PD  
(13 Kegiatan)  
6.529.914.000 (11,87%)

Peningkt sandi daerah & KI  
(3 Kegiatan)  
1.081.322.000 (1,97%)

**EX-BAU**

**SANDI**

**KOMINFO**

**STATIS  
TIK**

## **Belanja Langsung**

55.000.000.000 (73,35%)

Kegiatan Diskominfo

Peningkt Kualitas Pengelolaan  
Infokom Publik (3 Kegiatan)

16.014.250.000 (29,12%)

Pengemb Infrastruktur TIK  
( 3 Kegiatan)

22.916.250.000 (41,67%)

Pengemb E-Govt (3 Kegiatan)

4.534.714.000 (8,24%)

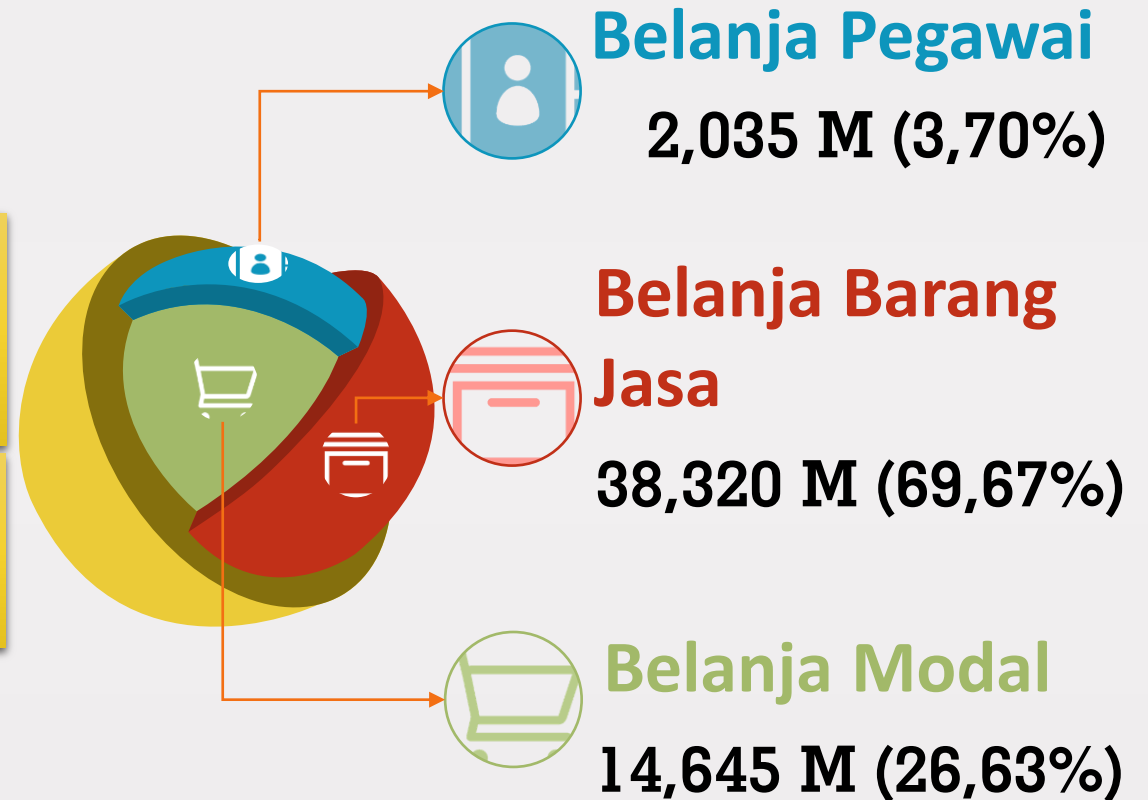
Pengemb Data Statistik Sektoral &  
Keterbukaan Informasi (4 Kegiatan)

3.173.550.000(5,77%)

# Belanja Langsung Diskominfo

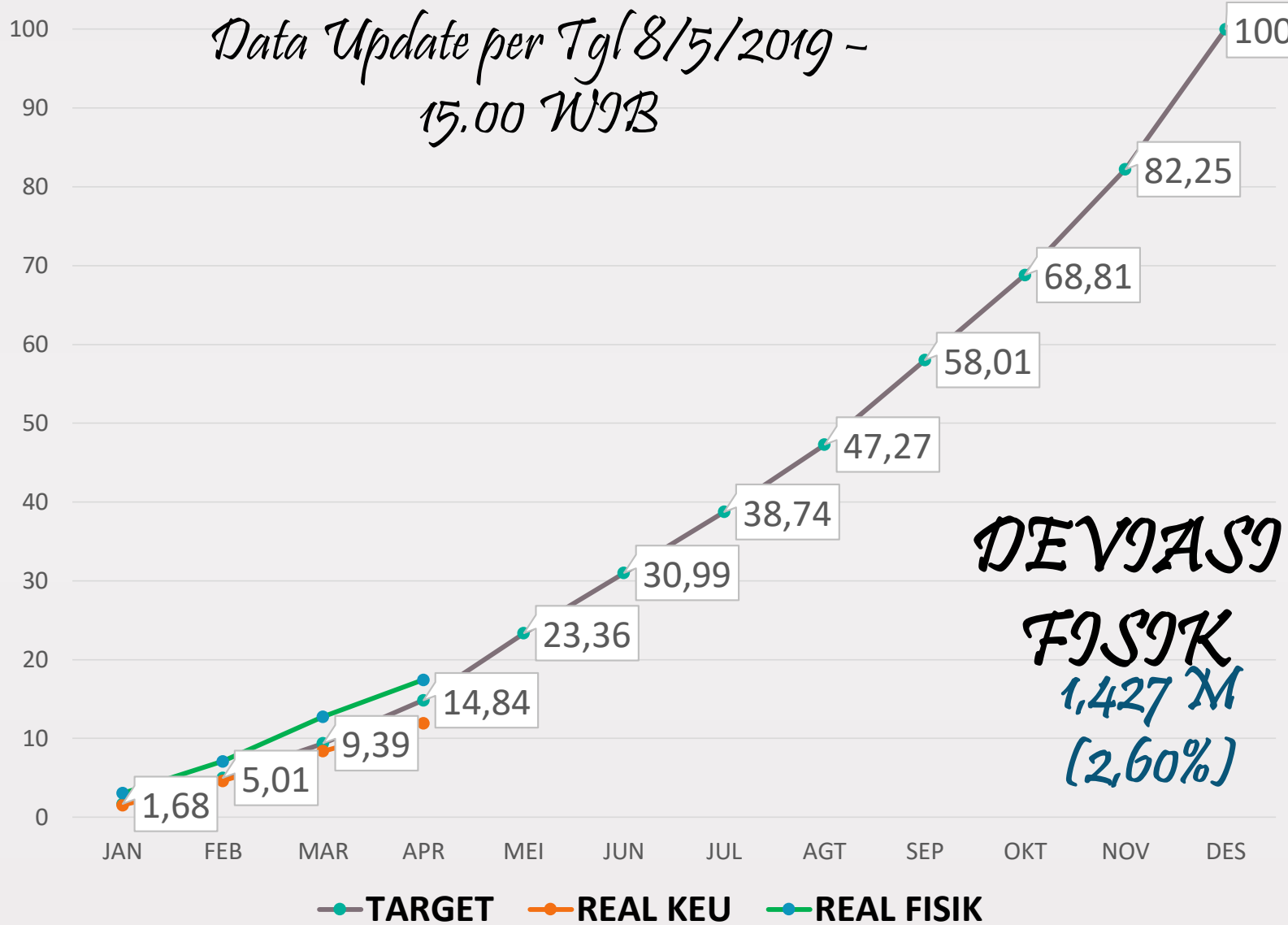
Anggaran BL

**55 Milyar**

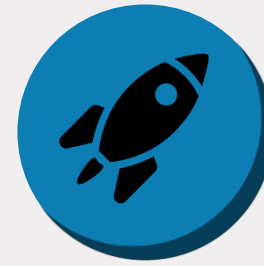


# BL DISKOMINFO

Data Update per Tgl 8/5/2019 -  
15.00 WIB



DEVIASI  
FISIK  
1,427 M  
(2,60%)



TARGET  
87,62  
M



REAL KEU  
6,559  
M



REAL  
FISIK  
9,589  
M

(17,44)



# Capaian

---

# Kinerjanya

---

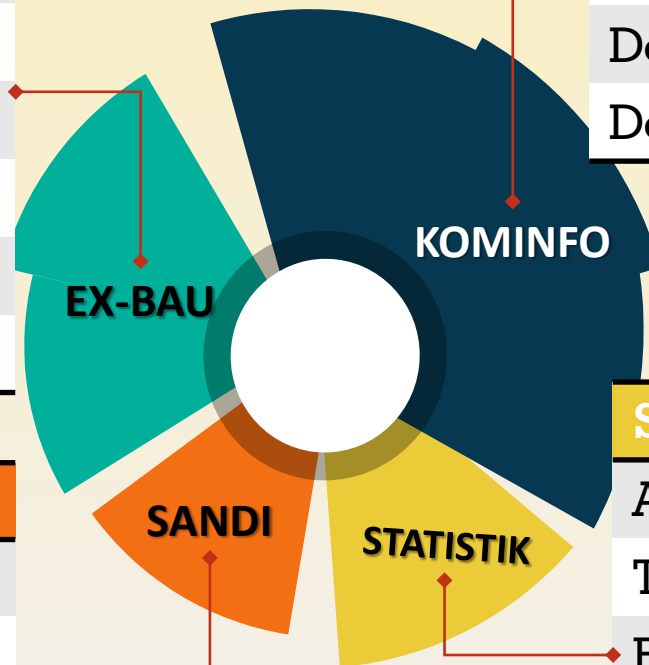
*Data Update per Hari Rabu, Tgl 8 Mei  
2019 - 15.00 WIB*



# REALISASI APBD per Urusan

EX-BAU/ SEKRETARIAT		
Anggaran	7,279 M	
Target Fisik	2,217 M	(29,66%)
Real Keu	1,802 M	(23,98%)
Real Fisik	2,305 M	(31,66%)
Deviasi Fisik (+)	87,438 Juta	(1,20%)
Deviasi Keu	- 502,247 Juta	(6,90%)

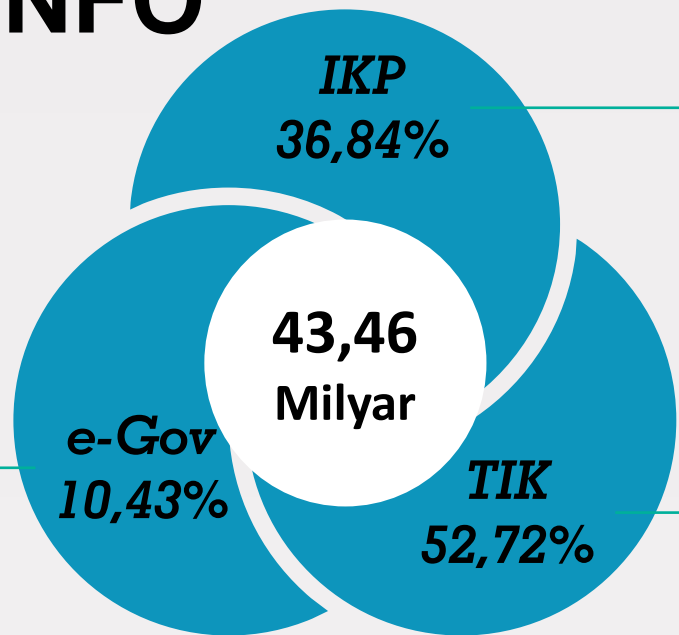
PERSANDIAN		
Anggaran	1,081 M	
Target Fisik	404,734 Juta	(37,43%)
Real Keu	432,359 Juta	(39,38%)
Real Fisik	449,016 Juta	(41,52%)
Deviasi Fisik	44,281 Juta	(4,10%)
Deviasi Keu	- 16,657 Juta	(1,54%)



KOMINFO		
Anggaran	43,465 M	
Target Fisik	4,443 M	(10,22%)
Real Keu	3,495 M	(8,04%)
Real Fisik	5,765 M	(13,26%)
Deviasi Fisik (+)	1,322 M	(3,04%)
Deviasi Keu	- 2,269 M	(5,22%)

STATISTIK		
Anggaran	3,173 M	
Target Fisik	1,097 M	(34,57%)
Real Keu	828,517 Juta	(26,11%)
Real Fisik	1,070 M	(33,73%)
Deviasi Fisik (+)	- 26,614 Juta	(0,84%)
Deviasi Keu	- 242,050 Juta	(7,63%)

# KOMINFO



## Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik

**16.014.250.000**

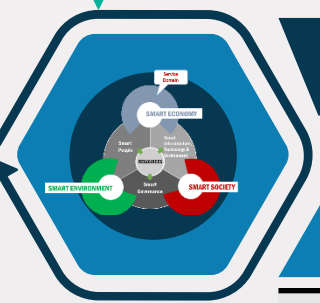
Target Fisik	2,520 M	(15,74%)
Real Keu	1,322 M	(8,26%)
Real Fisik	2,840 M	(17,74%)
Deviasi Fisik (+)	319,840 Juta	(2%)
Deviasi Keu	- 1,518 M	(9,48%)



## Pengemb Infrastruktur TIK

**22.916.250.000**

Target Fisik	733,82 Juta	(3,20%)
Real Keu	823,77 Juta	(3,59%)
Real Fisik	1,494 M	(6,52%)
Deviasi Fisik (+)	760,26 Juta	(3,32%)
Deviasi Keu	- 670,31 Juta	(2,93%)



## Pengemb E-Govt

**4.534.714.000**

Target Fisik	1,188 M	(26,21%)
Real Keu	1,349 M	(29,77%)
Real Fisik	1,430 M	(31,55%)
Deviasi Fisik (+)	242,09 Juta	(5,34%)
Deviasi Keu	- 80,721 Juta	(1,78%)



# Rincian Kegiatan



# AKSI HAM

Dinas Kominfo diminta untuk **meyediakan rekap aduan masyarakat khususnya terkait dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan**

---

## **JADWAL PELAPORAN**

- a. B03 tanggal 28 Maret – 11 April 2019;
- b. B06 tanggal 28 Juni – 11 Juli 2019;
- c. B09 tanggal 28 September – 11 Oktober 2019;
- d. B12 tanggal 28 Desember 2019 – 11 Januari 2020

NO	Materi yang dikomunikasikan					Tindak Lanjut I		Tindak Lanjut II	
	Nomor Registrasi	Tanggal Pengajuan	Nama Penyampai Komunikasi	Kategori berdasarkan Permasalahan *)	Pokok Materi	Tanggal Respon I	TANGGAPAN	Tanggal Respon II	Ket
1		14-01-2019	Untung tri mulyono / bejo kero (08157xxxxxxx)	Konflik Lahan	Terjadi penyerobotan tanah,,di Bangunharjo Banyumanik,,tepatnya di SMA NASIONAL,,melibatkan oknum kelurahan,,,mohon bantuan pebyelesaian ,nuwun,	14-01-2019	terima kasih atas laporannya silahkan disampaikan di Pemkot Semarang email: semarangkota.go.id atau melslui telpon 024 351335.terima kasihlaporan telah diselesaikan		Laporan Selesai
2		21-02-2019	Sabiqo Mumtaza (sabiqxxxxxxx)	Konflik Lahan	Kami berada di Desa.gempol sewu Dukuh.gempol sewu 2 rt 2 rw 5 Kec.Rowosari Kab.Kendal.Tolong kami pak mohon bantuannya agar masalah akses jalan ini diselesaikan karna sudah 4bln kami minta bantuan desa kecamatan bahkan dri kendal belum ada yg menyelesaikan.pdahal secara IMB saja itu gak boleh karna merugikan yg lain.	22-02-2019	Diteruskan ke Disperakim		Laporan Bukan Wewenang
3		02-04-2019	candra gunawan (candrxxxxxxx)	Hak Anak dan Perempuan	pak gubenuur , saya mau minta keadilan. setahun yg lalu anak sy diperkosa oleh kakak kelasnya di toilet sekolah Terang bangsa, sudah sy laporkan ke polwiltabes smg . tetapi sampai setahun ini baru pelimpahan ke kejaksaan. sy dihadapkan ke jaksa bernama ibu winda . beliau minta uang sebesar 15 jt agar kasus ini bisa berjalan . bagaimana ini pak gubenuur ? terima kasih pak				

# INDEKS RB 2019 (LKE)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JATENG

KOMPONEN PENGUNGKIT:

PENATAAN TATA LAKSANA

2. e-

GOVERNMENT.

- Rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi
- Pengembangan e-government di lingkungan internal (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)
- Pengembangan e-government pelayanan kepada masyarakat (website informasi, aduan masy)
- Pengembangan e-government dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)

3. KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK:

- Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
- Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

# LIKE RB 2019 B.03

Penilaian				Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan
IV.	PENATAAN TATALAKSANA (5)							
	2	E-Government (2)				1,50	100,00 %	
		a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1		Nama Dokumen : Master Plan Smart Province, Master Plan TIK
		b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	A	1		Nama Dokumen : Pergub Nomor 89 Tahun 2016 (Integrasi Sistem Informasi)
		c.	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	A	1		Nama Dokumen : Pergub Nomor 13 Tahun 2018 (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat)
		d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	A	1		Nama Dokumen : Pergub Nomor 67 Tahun 2017 (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah)

Penilaian			Penjelasan	Jawaban	Nilai	%
		<b>3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)</b>			<b>1,25</b>	<b>100,00 %</b>
		a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1	
		b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses	A	1	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala	A	1	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Nama Dokumen : SK GUB NO 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID PROV JATENG
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nama Dokumen : Daftar Informasi Publik (website <a href="http://ppid.jatengprov.go.id">ppid.jatengprov.go.id</a> )
Monev Web akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019

# ROADMAP RB

**DISKOMINFO**

**2018**

**2023**

## Tujuan RB PROVINSI

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good governance and Clean government*)**

### Sasaran

*1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*

*2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan*

*3. Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik*

Indikator Kinerja

*Indeks SPBE*

2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,68 (Hasil Evaluasi Kemenpan-RB)	2,76	2,88	3,0	3,12	3,24

# Program Prioritas

# Area Perubahan

# Target Indikator / *Keg Prioritas*

# 8

## Area Perubahan

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan & Penguatan Kelembagaan
4. Tatalaksana
5. Sistem Manajemen SDM
6. Akuntabilitas Kinerja
7. Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

Peningkatan Efektifitas & Efisiensi Manajemen Pemerintahan

Peningkatan Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen SDM Aparatur

### 4. Sistem Tatalaksana yang baik

#### Indeks SPBE

2019	2020	2021	2022	2023
2,76	2,88	3,0	3,12	3,24

#### Pengemb & Pengelolaan App berbagi pakai (Jml)

2019	2020	2021	2022	2023
9	11	13	14	15

#### Penguatan keterbukaan informasi publik (OPD)

2019	2020	2021	2022	2023
49	49	49	49	49

### 8. Pelayanan Publik yang berkualitas

#### Persentase tindak lanjut pengaduan

2019	2020	2021	2022	2023
85	86	87	88	89

#### Pengelolaan pengaduan pelayanan publik (OPD)

2019	2020	2021	2022	2023
49	49	49	49	49

# Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2023

## Tujuan RB Kab./Kota

**Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten/Kota**

### Sasaran

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*
- 2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan*
- 3. Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik*

### Indikator Kinerja

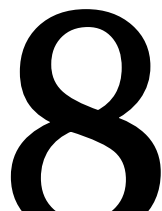
*Indeks SPBE Kab./Kota 2,6 ke atas*

2018	2019	2020	2021	2022	2023
9*	5	10	15	18	20

\*Hasil identifikasi eks bakorwil I & II



# Area Perubahan



## Area Perubahan Kabupaten/ Kota

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan & Penguatan Kelembagaan
4. Tatalaksana
5. Sistem Manajemen SDM
6. Akuntabilitas Kinerja
7. Pengawasan
8. Pelayanan Publik

# Target Indikator

## Keg Prioritas

### 4. Sistem Tatalaksana yang baik

#### 1. Jumlah Kab./ Kota yang Indeks SPBE-nya 2,6 ke atas

2018	2019	2020	2021	2022	2023
9*	5	10	15	20	25

*Koordinasi/Fasilitasi perluasan penerapan e-gov yang terintegrasi (Kab./Kota)*

2019	2020	2021	2022	2023
35	35	35	35	35

#### 2. Jumlah Kab./Kota yang Nilai Keterbukaan Informasi Publik 60 ke atas

2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	20	23	26	28	30

*Koordinasi/Fasilitasi penerapan keterbukaan informasi publik (Kab./Kota)*

2019	2020	2021	2022	2023
35	35	35	35	35

# QUICK WIN

(RB 2018-2023)  
DISKOMINFO

“Program percepatan Reformasi Birokrasi, yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat”

## Layanan Sistem Satu Data

Kegiatan Prioritas	Satuan	Target (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pengintegrasian Data</b>	<b>Data di Perangkat</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>90</b>

# Indikator SDGs *DISKOMINFO (2018-2023)*

GOAL/TARGET	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband		KEWENANGAN PUSAT (BUKAN KEWENANGAN DAERAH)					
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Presentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan		KEWENANGAN BIRO APBJ SETDA PROV. JATENG					
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	Tersedianya badan publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	DIP	50	60	65	70	75	80
	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	DIP	50	60	65	70	75	80
	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	%	80	81	82	83	84	85
<i>Target 17.6. Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global</i>	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband		KEWENANGAN PUSAT (BUKAN KEWENANGAN DAERAH)					

